

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota-kota di seluruh dunia pasti terdapat kawasan kumuh ataupun pemukiman miskin. Kawasan kumuh ini merupakan masalah yang tidak mungkin dihindari. Adanya kawasan kumuh ini dapat di sebabkan oleh faktor dari perkembangan kota itu sendiri ataupun karena kegagalan masyarakat untuk menjangkau dan memiliki kebutuhan untuk menunjang hidupnya. Bagi kota besar seperti Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, kawasan kumuh merupakan masalah yang serius, karena di khawatirkan dapat terus meningkat dan menimbulkan masalah sosial lainnya.

Pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kawasan kumuh, upaya yang dilakukan adalah program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU ini adalah program yang dilaksanakan pemerintah secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 propinsi yang menjadi platform atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan termasuk dari pemerintah pusat, swasta maupun masyarakat. KOTAKU sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dari pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (*Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*, 2021). Program KOTAKU sendiri mengacu pada peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang mengamankan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu dengan meningkatkan kualitas di daerah pemukiman kumuh, pencegahan pertumbuhan dan perkembangan pemukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Tabel 1.1 Tabel Luas Kawasan Kumuh

Tahun	Indonesia	Kota Surakarta	Kabupaten Sukoharjo
2020	44308,14 Ha	135,971 Ha	138,09 Ha

Sumber : KOTAKU 2020

Pada tahun 2020 luas seluruh kawasan kumuh di Indonesia adalah 44308.14 Ha yang terdapat di 34 propinsi. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan kumuh seluas 3,09% dari luas Kota Surakarta yakni 44.04 km<sup>2</sup>. Kawasan kumuh tersebut tersebar di 5 kecamatan. Sedangkan, pada Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan kumuh seluas 0,3% dari luas Kabupaten Sukoharjo yakni 466.7 km<sup>2</sup> yang tersebar di 6 kecamatan.

Lokasi penelitian di ambil 3 desa/kelurahan di setiap kota/kabupaten. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan desa/kelurahan yang memiliki luas kawasan kumuh terbesar. Berdasarkan SK Kumuh nomor 640/69.9/2020 lokasi terluas di Kota Surakarta berada di Kelurahan Mojo, Kelurahan Jebres dan Kelurahan Tegalarjo. Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan SK Kumuh nomor 663/626/2020 yang memiliki luas kawasan kumuh terbesar yakni Desa Bulakrejo, Desa Kadokan dan Desa Mancasan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian sebagaimana diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak program KOTAKU terhadap kualitas lingkungan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana dampak KOTAKU terhadap kesejahteraan penduduk di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dampak program KOTAKU terhadap kualitas lingkungan di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis dampak program KOTAKU terhadap kesejahteraan penduduk di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dampak program KOTAKU terhadap kawasan kumuh di dua daerah yakni Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Dari dampak program KOTAKU terhadap dua daerah tersebut penelitian ini juga berguna untuk studi banding dari program tersebut terhadap daerah yang berbeda.

### **1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya**

#### **1.5.1 Telaah Pustaka**

##### **a. Pemukiman Kumuh**

Pusat Studi Perkotaan et al. (2006) mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan perumahan yang dicirikan oleh kondisi yang beragam seperti, perumahan miskin, kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan kepadatan ruangan, layanan lingkungan yang sangat buruk terutama fasilitas air dan sanitasi, serta status sosial ekonomi sebagian besar penduduk yang sangat redah dan kurang jaminan kepemilikan. Pemukiman kumuh di tandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan hunian yang sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas rumah yang sangat rendah, kondisi sarana dan prasarana dasar yang kurang memadai seperti air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, ruang terbuka dan fasilitas kesehatan, serta rendahnya tingkat pendapatan penduduknya, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang sangat rendah, dan rendahnya privasi keluarga (Supriyatno, 2020)

## b. Penyebab Perkembangan Pemukiman Kumuh

Penyebab perkembangan pemukiman kumuh dikarenakan pertumbuhan penduduk yang pesat akibat migrasi penduduk miskin pedesaan ke wilayah metropolitan besar kemudian secara rutin beralih ke pemukiman kumuh yang liar untuk berlindung (Latif et al., 2016). Di kota-kota besar tempat perkotaan dunia menarik kekayaan, kemewahan dan prestise, mereka juga dikatakan terpolarisasi secara social ke tingkat yang lebih besar dari pada kota-kota lain dan untuk menarik migran secara tidak proposional sehingga gaya hidup masyarakat yang berubah mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di kota tersebut dan menimbulkan pemukiman kumuh (Surya et al., 2021). Selain penghasilan yang rendah, literasi perempuan yang buruk juga menjadi penyebab perkembangan pemukiman kumuh terutama di kota Coimbatore, India (Singh, 2020). Faktor umum dari pemukiman kumuh ini adalah kemiskinan, kualitas rumah tangga yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, pusat masyarakat berpenghasilan rendah, tenaga kerja terampil dan tidak terampil, layanan kesehatan yang terbatas dan lingkungan yang tidak sehat, struktur sosial yang canggung, korupsi dan lain-lain (Shammi et al., 2018).

## c. Karakteristik Pemukiman Kumuh

Karakteristik pemukiman kumuh ada dua yakni fisik dan non fisik. Kriteria fisik meliputi keteraturan, kepadatan dan kelayakan bangunan serta ruang terbuka dan sistem sanitasi. Sedangkan kriteria non fisik mengacu pada manusia yang menghuni kawasan kumuh yang identik dengan kelas ekonomi bawah (Ajmain et al., 2019). Kawasan kumuh memiliki ciri yakni medan kotor, jorok, tidak teratur dan tidak sehat, masyarakat miskin, berpenghasilan rendah, menganggur dan bila bekerja biasanya kasar atau pekerjaan serabutan, masyarakat urbanisasi sebagian besar migran dari pedesaan ke perkotaan yang tidak memiliki ketrampilan sebagian besar, fasilitas umum tidak memadai, bangunan rumah yang di tempatu sebgaiian besar gubuk dan rumah semi permanen, lokasi merupakan tingkat kriminalitas tinggi dan masyarakat rentan terkena kasus serta emosional masyarakat tinggi(Supriyanto, 2014).

#### d. Perbedaan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Kawasan perkotaan adalah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang berupa daerah pinggiran sekitarnya/kawasan suburban. UU No. 24/1992 mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Kustiwan, 2014)

#### e. Kesejahteraan Penduduk

Indikator kesejahteraan rakyat adalah indikator tingkat kesejahteraan penduduk sebagai cerminan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) suatu negara yang mencakup indikator-indikator kepedudukan, perumahan dan lingkungan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan, gizi, ketenagakerjaan dan pengeluaran. Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks gabungan yang dikenal dengan Physical Quality of Life Index (PQLI) dan Indeks Kualitas Hidup (IKH) yang diperkenalkan oleh Morris D. Morris. IKH tersebut terdiri dari 3 indikator, yaitu; tingkat harapan hidup, angka kematian, dan tingkat melek huruf (Rahmatulloh, 2017).

#### f. Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antaran pemerintah pusat , pemerintah provinsi, kota/kabupaten,

masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/ kota sebagai pelaku utama. Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard). Sumber pembiayaan Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah. Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah adalah sekitar 45%. Tujuan umum program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan dan layak huni, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan melalui kegiatan (a) pembangunan /rehabilitasi infrastruktur pemukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan (b) penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta (c) pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat. Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari **7 aspek**. Aspek tersebut yakni ada kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan ketersediaan ruang terbuka hijau (*Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*, 2021)

### **1.5.2 Penelitian Sebelumnya**

Berdasarkan jurnal karya Ika Nurrachma dan Nina Widowwati yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Diketahui bahwa Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh tertinggi se-Jawa Tengah dengan luasan kumuh sebesar ±415,83 Ha. Permasalahan kumuh di Kota Semarang ialah permukiman kumuh di pesisir, pusat dan pinggiran kota dengan tingkat kumuh ringan hingga berat. Berdasarkan Studi Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh dan Profil Permukiman Kumuh dalam RP2KPKP Kota Semarang Tahun 2017, program pembangunan yang telah dilaksanakan di dalam kawasan permukiman tidak semuanya dapat berkontribusi terhadap pengurangan kumuh yang ada. Kecamatan Tugu memiliki tiga kelurahan yang tercatat dalam wilayah kumuh, antara lain di Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Mangkang Kulon, dan Kelurahan Mangkang Wetan. Berdasarkan jurnal Ary Prihantato, dkk yang berjudul Identifikasi Kondisi Kebencanaan di Kawasan Kepesisiran Kecamatan Tugu Kota Semarang, masalah utama kondisi kebencanaan di Kecamatan Tugu yaitu, erosi pantai, banjir sungai, genangan pasang, dan intrusi air laut. Kondisi kebencanaan di Kecamatan Tugu tersebut merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan adanya permukiman kumuh (Rachma & Widowati, 2020)

Berdasarkan Jurnal Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi di Kelurahan Tanjung Mas antara lain: permasalahan jalan dan drainase lingkungan, prasarana pengelolaan air limbah (sanitasi), pengelolaan sarana persampahan, dan pengamanan bahaya kebakaran. Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada implementasi program Kotaku dalam upaya menanggulangi kawasan kumuh dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program Kotaku, lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kelurahan Tanjung Mas kota Semarang. Tujuan Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu: (i) implementasi program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) dalam menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, dan (ii) menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan berusaha untuk menganalisis Implementasi program Kotaku di Kelurahan Tanjung Mas (Sitorus et al., 2020)

Berdasarkan Jurnal Identifikasi Spasial Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta oleh Andhika Bangun Taji. Salah satu penanganan kawasan kumuh adalah melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana-sarana baru, baik dari segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni. Perlu dikaji dan diidentifikasi secara spasial apakah ada hubungan antara meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan faktor-faktor pembentuk permukiman kumuh yang terdiri dari 3 macam faktor yaitu faktor fisik, faktor sosial dan faktor ekonomi serta faktor dan variabel mana yang paling berpengaruh dan apakah luas permukiman kumuh sebelum adanya program KOTAKU di Kelurahan Semanggi menjadi berkurang setelah adanya program KOTAKU. Metode Penelitian Penelitian mengenai Dampak Program KOTAKU terhadap kondisi lingkungan sekitar di Kota Surakarta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deduktif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan cara integrasi antara penginderaan jauh dengan data sekunder yaitu data verifikasi keluarga miskin Kota Surakarta. Lokasi yang dipilih adalah Kelurahan Semanggi di Kota Surakarta. Kelurahan Semanggi dipilih karena merupakan lokasi prioritas program KOTAKU dan terletak di pinggiran Kota Surakarta. Selain itu, Kelurahan Semanggi mempunyai karakteristik kumuh ringan dan rawan bencana banjir kota yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana permukiman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit SPOT 5 Kota Surakarta tahun 2018 dan data sekunder yang berasal dari data verifikasi keluarga miskin Kota Surakarta tahun 2018. Analisis data yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas lingkungan permukiman kumuh adalah dengan skoring atau pemberian bobot pada

masing-masing parameter. Sedangkan untuk mengkaji hubungan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan faktor fisik dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhinya menggunakan korelasi spearman rank. Kebijakan pengurangan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi menggunakan strategi utama yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni. Dengan peningkatan ekonomi, maka diharapkan masyarakat dapat mengakses perbaikan dan pemeliharaan rumah menjadi layak, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, serta mampu mendapatkan rumah yang berdiri di atas tanah legal sesuai dengan peruntukannya sehingga, permasalahan lain baik yang menyebabkan kekumuhan atau akibat kekumuhan dapat diminimalkan. Karakteristik permukiman di blok permukiman ini pada umumnya mempunyai kepadatan dan keteraturan bangunan yang relatif rendah dan lebih teratur serta memiliki sarana prasarana permukiman yang lebih lengkap dan memadai seperti pembuangan sampah, drainase yang baik serta kondisi jalan yang sudah diperkeras dengan aspal (Taji, 2014)

Berdasarkan jurnal Dampak Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Di Kota Pontianak (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan) oleh Della Juliatum Maharani dkk. Program yang dilaksanakan di Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Selatan mengalami pengurangan luas kumuh tercepat melalui peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan infrastruktur permukiman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak ekonomi yang diberikan dari kegiatan peningkatan kualitas Program KOTAKU. Kegiatan peningkatan kualitas adalah kegiatan yang banyak berkontribusi untuk pengurangan luasan dan tingkat kekumuhan. Salah satu komponen untuk mewujudkan permukiman yang nyaman adalah komponen ekonomi yakni tersedianya lapangan pekerjaan . Aspek ekonomi sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan kekumuhan yang terdiri dari pendapatan masyarakat, pekerjaan masyarakat, serta terbangunnya rumah tidak permanen . Ketika telah terjadi pembangunan fisik atau peningkatan kualitas kumuh, maka diharapkan aspek non fisik seperti aspek ekonomi juga terbangun menjadi lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana

digunakan untuk mengkaji dampak ekonomi Program KOTAKU. Observasi digunakan untuk melihat pembangunan yang dilakukan oleh Program KOTAKU dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sementara, dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak dapat ditemukan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data utama penelitian adalah wawancara, guna mencapai tujuan penelitian yakni mengetahui diberikan oleh wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Melalui analisis isi pada hasil wawancara kepada 8 responden, diketahui dampak ekonomi yang diberikan dari Program KOTAKU terjadi baik dalam hal pendapatan maupun pekerjaan. Ketika Program KOTAKU mengadakan kegiatan pembangunan maka dibentuk KSM sesuai dengan kegiatan pembangunan masing-masing. Pekerjaan hanya merupakan dampak secara tidak langsung terhadap masyarakat akibat adanya pembangunan infrastruktur Program KOTAKU. Hal ini dapat disebutkan karena setelah adanya pembangunan, masyarakat dapat bermata pencaharian lebih cepat dan mudah dari sebelumnya karena jalan sudah jauh lebih baik. Dengan demikian, dapat digolongkan kepada dampak terhadap aspek pekerjaan meski tidak membuka lapangan pekerjaan namun setidaknya dapat meningkatkan efektivitas masyarakat untuk bekerja. (Maharani et al., 2020)

Tabel 1.2 Tabel Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Ika Nurrachma dan Nina Widowati	Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang	Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah tentang program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu dan untuk mengetahui faktor pendorong maupun faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling	Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu sudah sesuai dengan Surat Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh tersebut dibuktikan dengan telah terlaksananya program mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu adanya kendala teknis ketika pelaksanaan program serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait permasalahan sampah

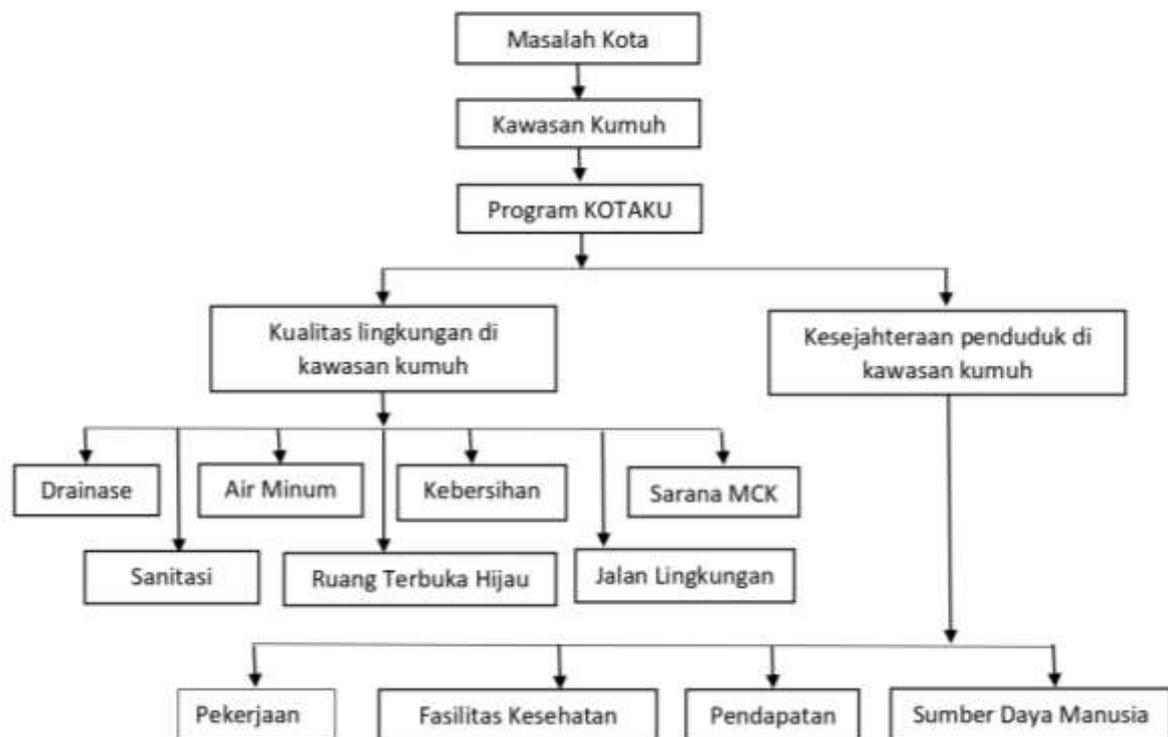
<p>Siti Aminah Azzahra</p>	<p>Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang</p>	<p>Untuk mengetahui implementasi program Kotaku di Kecamatan Citamiang dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikannya dengan menggunakan enam dimensi yang ada dalam teori Van Metter dan Van Horn</p>	<p>Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Subjek yang dijadikan informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi</p>	<p>Implementasi program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi belum terlaksana dengan baik. Masih kurangnya sumber daya alam seperti fasilitas tanah. Selain itu masih terjadinya miskomunikasi yang diakibatkan dari kurangnya sosialisasi mengenai program Kotaku dan juga masih kurangnya pemahaman dari BKM mengenai pembuatan proposal dan RAB untuk program Kotaku</p>
<p>Andhika Bangun Taji</p>	<p>Identifikasi Spasial Kualitas Lingkungan Pemukiman Kumuh Di Kelurahan</p>	<p>Menjelaskan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Semanggi setelah adanya program KOTAKU dan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian deduktif kuantitatif</p>	<p>Kelurahan Semangi pada tahun 2021 setelah adanya program KOTAKU telah berhasil menurunkan luasan kekumuhan dari 76,03 ha menjadi 18,36 ha. Pengurangan tersebut antara</p>

	Semanggi Kota Surakarta	Mengidentifikasi faktor dan variabel yang berpengaruh terhadap kualitas permukiman Kumuh Kelurahan Semanggi		lain sebesar 38,05 ha (50,04%) mempunyai kualitas lingkungan permukiman baik, dan sebesar 19,62 ha (25,72%) mempunyai kualitas lingkungan permukiman sedang, serta Dari hasil uji statistik regresi linier berganda didapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman adalah kepadatan bangunan, keteraturan bangunan dan pengelolaan persampahan dan yang kurang berpengaruh adalah tingkat penghasilan kepala keluarga dan tingkat pengeluaran kepala keluarga.
Della Juliatum Maharani , Nana Novita	Dampak Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat	Untuk mengkaji dampak ekonomi yang diberikan dari kegiatan peningkatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana	Program KOTAKU memberikan dampak positif dari aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan dan penambahan lapangan pekerjaan

Pratiwi dan Vetti Puryanti	Di Kota Pontianak (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan)	kualitas Program KOTAKU	digunakan untuk mengkaji dampak ekonomi Program KOTAKU	masyarakat. Pendapatan merupakan dampak yang paling besar dirasakan manfaatnya ketika pelaksanaan pembangunan Program KOTAKU. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur serta kegiatan ekonomi dari Program KOTAKU perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak lebih dalam aspek ekonomi masyarakat
----------------------------	---	-------------------------	--	--

## 1.6 Kerangka Penelitian

Perkembangan kota terjadi di setiap daerah, sehingga semakin berkembangnya suatu kota semakin banyak permasalahan yang timbul. Salah satu permasalahan dari perkembangan kota adalah adanya kawasan kumuh. Penduduk yang tinggal di kawasan kumuh tersebut memiliki kondisi yang tidak menguntungkan dikarenakan lingkungan yang tidak sehat, serta kawasan pemukiman yang tidak nyaman. Maka dari itu pemerintah membuat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada di kota/kabupaten. Program tersebut memiliki dampak yang berbeda di setiap kota/kabupaten, maka program ini juga berbeda dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

## 1.7 Batasan Operasional

**Geografi** merupakan studi mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Lingkup studi dari ilmu pengetahuan geografi ini mencakup bermacam-macam fenomena yang ada dan terjadi di permukaan bumi menurut Karl Ritter.

**Geografi Perkotaan** berkaitan dengan sifat-sifat ruang kota kecil dan besar dan berbagai cara mempengaruhi dan di pengaruhi proses-proses fisik, demografi, ekonomi, social, budaya dan politik. Geografi perkotaan berkaitan dengan variabilitas local dalam suatu konteks umum (Johnsoton, 1984)

**Kata “Kumuh”** sering digunakan untuk menggambarkan pemukiman informal di dalam kota yang memiliki perumahan yang tidak memadai dan kondisi kehidupan yang menyedihkan, mereka sering penuh sesak dengan banyak orang berdesakan di ruang tamu yang sangat kecil (Singh, 2020)

**Kesejahteraan Penduduk** menyiratkan suatu keadaan/kondisi dimana penduduk dapat menikmati kehidupan yang makmur, memuaskan, dimana kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi terjadi secara selaras dengan kualitas lingkungan (Rahayu, 2020)

**Areal Differentiation**, Suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut (Nugroho, 2013)